



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEBIJAKAN SUKU BUNGA ACUAN BI UNTUK STABILITAS NILAI TUKAR

Venti Eka Satya

Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.eka.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 24 dan 25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI *7-days reverse repo rate* pada level 5,75%. Bunga *deposit facility* dan *lending facility* juga tetap sama seperti bulan lalu, yakni di angka 5% dan 6,5%. Posisi tingkat suku bunga acuan ini telah bertahan selama empat bulan. Keputusan mempertahankan bunga acuan BI konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3% plus minus 1% sampai akhir tahun 2023 dan inflasi indeks harga konsumen (IHK) dapat segera kembali dalam kisaran 3% plus minus 1% pada triwulan III-2023. Kebijakan moneter difokuskan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) dan memitigasi dampak dari ketidakpastian pasar keuangan global. Para ekonom berpendapat bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75% karena menahan suku bunga adalah sikap paling hati-hati untuk saat ini. Diperkirakan BI akan terus mempertahankan suku bunga acuan hingga akhir 2023.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menilai keputusan mempertahankan suku bunga sudah tepat. Sebab, inflasi berbasis IHK terus turun secara bertahap dengan inflasi inti yang stabil. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama mencapai 5,03%. Indikator ini menunjukkan permintaan domestik cukup kuat dan terkendali. Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman, mengatakan keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan didasarkan pada perekonomian dalam negeri yang positif sambil mengantisipasi ketidakpastian eksternal. Meski saat ini inflasi tengah melandai, adanya fenomena El Nino bisa memicu lonjakan inflasi pangan. Ketidakpastian ekonomi global juga bisa memicu gejolak nilai tukar. Ketidakpastian ekonomi global akhir-akhir ini dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju dan ketidakpastian penyelesaian permasalahan plafon utang Pemerintah Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan AS mengatakan Pemerintah AS akan kekurangan uang untuk membayar tagihannya pada 5 Juni 2023. Potensi gagal bayar utang AS ini akan memberikan efek domino pada perekonomian global. *Default* atau gagal bayar utang akan membawa AS ke jurang resesi. Tingkat konsumsi AS akan terpukul, dan impor turun. Akibatnya, negara yang menggantungkan ekonominya pada ekspor ke pasar AS, termasuk Indonesia, akan terkena dampaknya. Pukulan ini akan diperparah dengan potensi nilai dolar AS terdevaluasi. Nilai dolar AS yang melemah akan membuat penurunan minat impor akibat penurunan nilai mata uang.

Suku bunga diarahkan untuk mengembalikan tingkat inflasi ke targetnya, yakni kisaran 2-4% pada 2023 serta untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Meskipun sejak awal tahun hingga 24 Mei 2023, nilai tukar rupiah mengalami penguatan sebesar 4,48%. Penguatan ini lebih baik dibandingkan dengan apresiasi Thailand sebesar 0,20% dan India sebesar 0,08%, serta Filipina yang terdepresiasi sebesar 0,10%. Akan tetapi, BI tetap mewaspadai peningkatan ketidakpastian global yang bisa memberikan tekanan terhadap rupiah karena potensi pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang saat ini masih cukup besar. BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar, pengendalian inflasi barang impor, dan memitigasi risiko rambatan ketidakpastian pasar keuangan.

Di sisi lain, kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran BI tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Atensi DPR

Keputusan Dewan Gubernur BI untuk mempertahankan tingkat suku bunga mendapat tanggapan yang positif dari para ekonom. Sesuai dengan fungsinya, BI harus senantiasa memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Di tengah berbagai ancaman eksternal dan ketidakpastian ekonomi global seperti El Nino dan gejolak ekonomi di beberapa negara maju, BI dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mengawasi berbagai kebijakan yang diambil BI dan lembaga terkait agar stabilitas moneter nasional dapat terkendali, mengingat saat ini perekonomian negara tengah dihadapkan pada berbagai ancaman eksternal. DPR RI juga perlu mendorong BI dan otoritas terkait untuk meningkatkan kehati-hatian dan memerhatikan pendapat para pakar ekonomi mengingat besarnya unsur ketidakpastian ekonomi global yang dihadapi oleh dunia saat ini.

Sumber

bi.go.id, 25 Mei 2023;
bisnis.com, 25 Mei 2023;
cnbcindonesia.com, 25 Mei 2023;
kompas.id, 25 Mei 2023;
republika.co.id, 25 dan 26 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023